



# **Rencana Kerja Tahun 2017**

## **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Oktober 2016

### **BAB I**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017.


Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2013 – 2018. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kerja sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi NTB.

Secara umum, Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhir kata, semoga apa yang disajikan dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 ini dapat menjadi acuan bagi pelaksana program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pada Bappeda Provinsi NTB.

Mataram, Oktober 2016

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



**Ir. RIDWAN SYAH, M.Sc., MTP.**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630626 199003 1 005

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **DAFTAR GAMBAR**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2015
  - 2.1.1 Realisasi Capaian Indikator Utama (IKU)
  - 2.1.2 Capaian Akuntabilitas Program dan Kegiatan/Capaian Kinerja
  - 2.1.3 Akuntabilitas Keuangan/Capaian Serapan Anggaran
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
  - 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja
- 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I (31 Maret 2015)
Tabel 2.3	Review Rancangan Awal RKPD Perubahan Provinsi NTB Tahun 2015 Terhadap Rencana Kerja Perubahan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Bappeda Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD Provinsi NTB Tahun 2017.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, SKPD diharapkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan mengacu pada RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang membahas tentang latar belakang, maksud, tujuan, dasar pertimbangan dan gambaran anggaran SKPD. Selain itu dibahas pula evaluasi capaian SKPD tahun sebelumnya (tahun 2015), dan evaluasi capaian SKPD sampai dengan tahun berjalan, serta program kegiatan yang akan dikerjakan.

Sebagai salah satu dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun 2016 tanggal ..... 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**



Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: ..... Tahun 2016, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

## **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 adalah:

- a. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bappeda Tahun 2017;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Pertimbangan
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2015
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017

#### **BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan

## **Bab IV    PENUTUP**

- 4.1    Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja
- 4.2.    Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3.    Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA**

Sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi terhadap target yang telah dibuat dalam pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui kegiatan-kegiatan yang tercapai dan belum tercapai baik secara makro maupun lingkup instansi. Pelaksanaan evaluasi Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 secara makro bercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dan Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, serta secara mikro adalah hasil kerja dari Renja tersebut. Bappeda Provinsi NTB berupaya secara optimal menjalankan program-program pemerintah, namun tentunya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terkait pencapaian target dimaksud.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2015**

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017, diuraikan tiga pokok realisasi capaian kinerja yaitu realisasi capaian Indikator kinerja Utama (IKU), realisasi capaian program dan kegiatan/capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan/serapan anggaran. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi NTB sangat berkaitan dengan Renstra Bappeda Provinsi NTB. Setiap kajian evaluasi Renja Tahunan Bappeda merupakan bagian dari capaian Renstra Bappeda yang mencakup rencana pembangunan lima tahunan.

##### **2.1.1. Realisasi Capaian Indikator Utama (IKU)**

Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 memuat 20 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja, dari ke 21 indikator kinerja tersebut sebanyak 2 indikator dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online (RKPD Online, NTB

Satu Data) serta Dokumen Perencanaan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan yang Berprestasi ditingkat Nasional.

IKU Bappeda menjadi salah satu indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, sehingga keberhasilan Bappeda dalam mencapai target pada tiap indikator yang telah ditetapkan akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan indikator kinerja RPJMD dimaksud. Di tahun 2015, Bappeda menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat sasaran strategis Tersebar nya Data dan Informasi Pembangunan Berbasis Web serta Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berdaya Guna, dan Laporan Pertanggungjawaban yang Berkualitas.

Tabel 2.1  
Target dan Realisasi IKU Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% dari target
1	<b>Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web</b>	Masyarakat yang mengakses layanan NTB Online (RKPD Online, NTB Satu Data)	<b>20.000</b>	<b>87.358</b>	436,79
2	<b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas</b>	dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	3 dokumen - RKPD - LPPD - LKPD	1 dokumen - LKPD	25 % (target 4 dokumen)

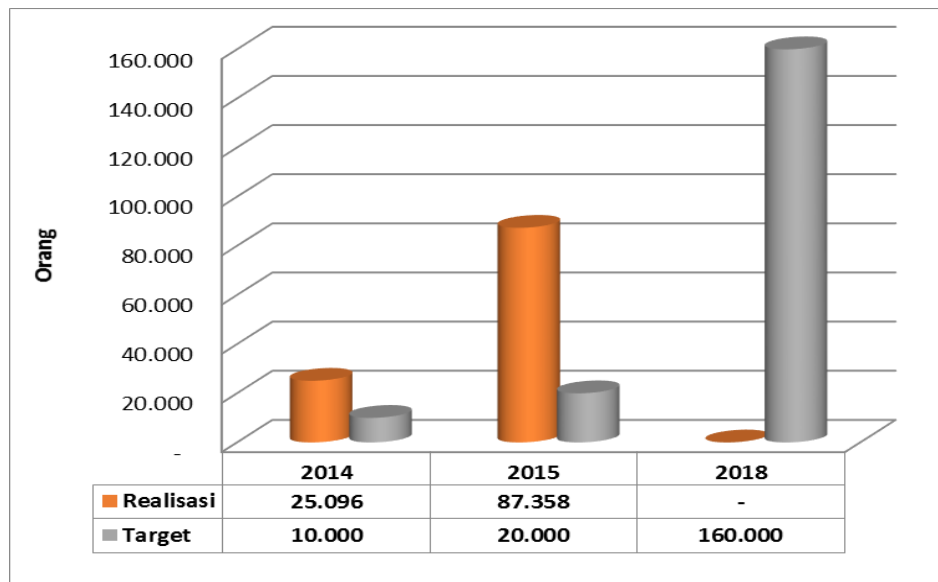
### **Sasaran Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web**

Sasaran strategis yang termuat dalam perjanjian kinerja Bappeda tahun 2015 ini memiliki indikator kinerja Masyarakat yang mengakses layanan NTB Online (RKPD Online, NTB Satu Data) dengan target pengunjung aplikasi online tersebut pada tahun 2014 sebanyak 10.000 orang dan target tahun 2015 sebanyak 20.000 orang, realisasi masing – masing tahun adalah 25.096 orang pada tahun 2014 dan 87.358 orang pada tahun 2015. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah pengunjung yang mengakses layanan NTB Online mencapai 436,79% dan melampaui target.

Tercapainya target capaian indikator kinerja ini merupakan hasil optimalisasi penyebaran informasi dan data perencanaan pembangunan daerah berbasis Web melalui Bale Ite, Website Bappeda Provinsi NTB dan RKPD Online. RKPD Online merupakan sistem perencanaan berjenjang secara online yang dapat diakses oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pengusulan program/kegiatan dan anggarannya, sistem ini juga sudah memberikan wadah bagi masyarakat/dewan untuk mengusulkan aspirasinya. Penggunaan sistem informasi merupakan sebuah jawaban bagi kebutuhan masyarakat masa kini yang menginginkan akses data yang cepat, luas dan terpercaya mengenai pembangunan daerah teraktual.

Gambar 2.1

Target dan Realisasi Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online



Layanan NTB Online dihitung dari jumlah masyarakat yang mengakses RKPD online, website Bappeda Provinsi NTB dan Bale Ite. Ketiga sistem informasi online tersebut memuat data dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah :**

a. Program Pengembangan Data/Informasi

Dua kegiatan dilaksanakan melalui program pengembangan data/informasi yaitu pengumpulan;updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan dengan hasil sebuah peta tematik Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pototano, Pemutakhiran peta

spasial potensi wilayah NTB untuk sektor pertanian dan Sistem Informasi Geografis usaha ternak sapi dan kerbau di NTB.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui program ini adalah Penyusunan Profile Daerah dengan membuat buku saku tentang informasi pembangunan daerah sebanyak 200 buku yang disebarakan untuk masyarakat serta buku profile daerah yang dicetak sebanyak 100 buku.

b. Program perencanaan pembangunan daerah

Dari program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan kegiatan penyusunan rancangan RKPD, dimana seluruh SKPD Provinsi NTB mengakses dan menyusun Rencana Kerja SKPD melalui RKPD Online sebelum dilakukan pembahasan pada Forum SKPD. Penggunaan sistem informasi pada proses perencanaan pembangunan mempersingkat waktu dan tahapan karena SKPD dan tim asistensi dapat bersama – sama memeriksa progress dari rencana kerja tahun berkenaan. Tahun 2015 sebanyak 10.684 pengunjung mengakses RKPD Online, angka tersebut berasal dari unsur pemerintahan. Melalui kegiatan ini RKPD Tahun 2015 dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur NTB dengan Nomor 18 Tahun 2015 pada tanggal 11 Mei 2015, dan RKPD tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2015.

c. Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah

Program ini merupakan program tambahan yang dimasukkan pada APBD Bappeda Provinsi NTB tahun 2015 untuk mendorong pencapaian indikator kinerja masyarakat yang mengakses NTB Online. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengolahan data dan informasi daerah yang menghasilkan pemanfaatan Bale Ite sebagai pusat data daerah oleh 7.977 orang di tahun 2015, tersedianya empat hasil kajian yang digunakan sebagai basis data daerah serta dua hasil suvey mengenai Islamic Center (IC) Mataram dalam cita, citra dan ekspektasi publik dan respon masyarakat terhadap program unggulan.

Adapun kajian yang dihasilkan adalah :

- Penelitian arus barang dan jasa di NTB
- Profil Kemiskinan di Perkotaan
- Kajian Potensi Perikanan dan Kelautan di Provinsi NTB
- Kajian dampak pariwisata dalam pembangunan daerah

Keberhasilan Bappeda Provinsi NTB dalam memberikan/menyebarkan informasi yang berbasis web telah dibuktikan dengan terpilihnya Bappeda sebagai SKPD terbaik I (atas penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB). Perhargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi.

### **Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas**

Sasaran dengan indikator kinerja dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional termasuk dalam indikator kinerja ke 28 dari 31 indikator kinerja pada RPJMD Provinsi NTB tahun 2013 – 2018. Dalam RPJMD terdapat 4 (empat) dokumen yang ditargetkan untuk memperoleh prestasi ditingkat nasional dan Bappeda ditunjuk sebagai penanggung jawab utama pencapaian indikator kinerja tersebut, dokumen – dokumen yang termasuk antara lain dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi NTB sebagai dokumen perencanaan yang dinilai oleh tim dari pusat (Bappenas dan pengamat perencanaan pembangunan) dan diumumkan pada kegiatan Musrenbangnas, dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTB yang dikoordinir oleh Biro Pemerintahan, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi NTB dikoordinir oleh Biro Organisasi serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB sebagai dokumen pertanggung jawaban.

Dokumen **yang** berhasil meraih prestasi di tahun 2015 adalah dokumen LKPD. Pemerintah Provinsi NTB meraih Opini WTP pada tahun 2015 atas LKPD tahun 2014, dan prestasi ini berhasil dipertahankan selama 4 (empat) tahun berturut – turut sejak 2011. Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut : laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP), sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material*

*uncertainties*), pengelolaan atas *Cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas Aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Pada tahun 2015 terdapat 7 komponen LKPD yang disajikan (berbasis akrual): Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dimulainya penggunaan basis akrual ini menjadi permasalahan tersendiri di tahun 2015 karena masih banyak penyesuaian dalam perhitungan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi NTB, pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Diharapkan pada tahun mendatang permasalahan ini sudah dapat teratasi dengan koordinasi yang dilakukan untuk pencatatan asset daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LPPD wajib dilaporkan kepala daerah kepada pemerintah setiap tahunnya sebagai potret penyelenggaraan pemerintah daerah pada aspek manajemen pemerintahan dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun. Evaluasi LPPD dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dan BPKP untuk memperoleh gambaran kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan publik, baik pada level pengambil kebijakan sampai level pelaksana kebijakan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 120-4761 tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013, Provinsi NTB menempati urutan ke 9 dari 33 provinsi dengan skor 2,5953 selisih 0,4566 dengan Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi pertama. Dokumen LPPD akan kembali dievaluasi pada tahun 2017.

Dokumen LKjIP disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dokumen ini dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN dan RB dengan tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas *outcome* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan



pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pada tahun 2015 Pemprov NTB memperoleh nilai 58,65 atau predikat CC meningkat, sehingga walaupun cukup memadai penyelenggaraan pemerintahan di NTB memerlukan beberapa perbaikan.

Komponen yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Dari sisi perencanaan kinerja hasil evaluasi menunjukkan Pemprov NTB telah menimplementasikan Sistem Perencanaan Kinerja melalui penetapan RPJMD periode 2013 – 2018, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Adapun rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut, Pemprov NTB dan unit kerja menyusun rencana aksi atas kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan target – target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja.

Bappeda memiliki satu dokumen yang ditargetkan untuk berprestasi ditingkat nasional yaitu RKP, target ini juga tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi NTB tahun 2013 – 2018. Pada tahun 2014 Pemprov NTB melalui Bappeda memperoleh penghargaan Pangripta Nusantara dari Menteri PPN/Bappenas karena sebagai Provinsi terbaik ke 3 kategori B dinilai menghasilkan dokumen perencanaan (RKP) yang berkualitas, sedangkan pada tahun 2015 penghargaan tersebut tidak diperoleh kembali karena dokumen RPJMD yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sedang direview untuk diselaraskan dengan dokumen RPJMN sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang – undangan yang berlaku.

Walaupun pada dasarnya RKP 2015 NTB yang dinilai oleh Tim sudah diselaraskan dengan RKP bahkan dalam prosesnya juga sudah disesuaikan dengan Rancangan RKP dalam rangka mengawal prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan di Provinsi NTB. Akan tetapi Pemprov NTB berhasil masuk menjadi salah satu dari 12 finalis Provinsi se Indonesia yang dinilai oleh Tim dari Bappenas, dan rekomendasi Bappeda Provinsi NTB untuk Kabupaten Lombok Utara membuahkan hasil Anugrah Pangripta Nusantara setelah melalui empat tahapan proses seleksi diantaranya : Penilaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Kabupaten/Kota tahun 2015, Penilaian Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan, penilaian Dokumen RKP oleh Tim Penilai Pusat dan Penilaian Prestasi dan Wawancara Kepala Bappeda Kabupaten/Kota oleh Tim pusat. Dari 33 Kabupaten/Kota se

Indonesia yang dinilai oleh Tim Jury independen yang dibentuk Bappenas RI, lalu mengerucut menjadi 12 Kabupaten/Kota, dimana KLU ada di dalamnya sebagai salah satu penerima Penghargaan Pangripta tersebut.

Ditahun 2017, agar terciptanya keselarasan dengan kebijakan nasional yang mengalami perubahan maka Bappeda Provinsi NTB akan merevisi RPJMD Provinsi NTB. Hal ini mempengaruhi penyusunan dokumen perencanaan tahun 2017 seluruh SKPD lingkup Provinsi NTB mengacu RPJMD hasil revisi agar tercipta keselarasan dengan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan sehingga harapan pada tahun mendatang NTB kembali mendapatkan penghargaan Pangripta Nusantara.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional dari sasaran strategis tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggung jawaban yang berkualitas, antara lain:

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan dimana pelaksanaannya dikoordinasikan Sekretariat dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan yang dilaksanakan sekretariat yaitu pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik hasil kegiatan ini merupakan langkah awal dari proses perencanaan pembangunan di daerah melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Kepala Bappeda sebanyak 2 (dua) kali di awal dan akhir tahun untuk memformulasikan rencana program dan kegiatan Kabupaten/Kota se-NTB yang akan ditindaklanjuti pada Forum SKPD Provinsi NTB. Dalam upaya optimalisasi perencanaan pembangunan daerah sebelum pelaksanaan kegiatan Forum SKPD, Bappeda mengawali proses melalui tahap Pra Forum SKPD yang diharapkan pada tahap ini SKPD memahami peran masing – masing dalam mencapai target indikator kinerja RPJMD. Sehingga dalam Forum SKPD lingkup Provinsi NTB program/kegiatan SKPD dapat diselaraskan dan tercapai sinergitas antar program/kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Februari 2015, setelah itu dilaksanakan Sarasehan Pembangunan NTB tahun 2017 dengan mitra pembangunan yang berjumlah 130 orang. Sarasehan pembangunan ini dilaksanakan untuk menjaring masukan dan usulan dari masyarakat NTB yang diwakili

oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, LSM dalam maupun luar negeri, pihak swasta dan lain sebagainya.

Selanjutnya dilaksanakan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPD 2017 melalui kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Dari seluruh proses kegiatan tersebut dihasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB yang memuat program/kegiatan Pemerintah Provinsi NTB. Sebagai apresiasi kepada daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan baik tahapan proses dan inovasi sampai dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas. Penghargaan Pangripta Nusantara bagi daerah yang dokumen perencanaannya dinilai baik dan inovatif yang diumumkan pada acara Musrenbang Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas,

Kegiatan lainnya yang berkontribusi untuk pencapaian indikator ini adalah monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan keluaran berupa dokumen evaluasi RKPD, KUA PPAS dan DPA SKPD Tahun 2015, Laporan/dokumen pemetaan program kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian 31 dan laporan hasil monitoring ke Kabupaten/Kota. Ketiga dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu bahan tim asistensi anggaran untuk mengevaluasi usulan program/kegiatan dari SKPD dan Kabupaten/Kota pada tahun mendatang.

Kegiatan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2017 dan Tahun 2015, rancangan KUA PPAS Tahun 2017 dan Tahun 2015, penyusunan dokumen perencanaan (laporan tahunan, rencana kerja tahun 2017, dokumen RKA 2017 dan RKA Tahun 2015 Bappeda), serta kegiatan sinkronisasi dokumen RPJMD Provinsi NTB dengan melakukan review RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018 juga memiliki peranan untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang berkualitas, selain itu disusunnya Rancangan Perda Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu melalui kegiatan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah Bappeda untuk menetapkan sebuah standar pada proses perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan setiap proses perencanaan pemerintah daerah Provinsi NTB.

Program perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mencapai dokumen perencanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional, meskipun tahun ini dokumen perencanaan belum memperoleh penghargaan dimasa mendatang akan ditingkatkan dengan menyelaraskan dokumen perencanaan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat SKPD di lingkup Provinsi NTB.

### 2.1.2. Capaian Akuntabilitas Program dan Kegiatan/Capaian Kinerja

Akuntabilitas program dan kegiatan pada Bappeda provinsi NTB merupakan rincian analisis program dan kegiatan secara akumulatif dari seluruh kegiatan pada masing-masing program yang dilaksanakan pada tahun 2015. Gambaran capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 disajikan dalam Table 2.2.

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
<b>I</b>	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>					
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	Penyediaan jasa surat menyurat	Prangko dan penggandaan surat dinas yang tersedia Sarana administrasi yang tersedia : - Prangko dan benda pos lainnya - Administrasi surat-surat yang digandakan	1 Tahun  300 lembar  24.000 lembar	1 tahun  300 lembar  24.000 lembar
			Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi yang tersedia : - Telepon - Air - Listrik - Pemasangan listrik baru - Surat kabar/faximile/Internet - Pemasangan VPN-IP - Pemasangan Indihome - Pengadaan access point	1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 paket  12 bulan 8 bulan 15 titik 12 buah	1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 paket  12 bulan 8 bulan 15 titik 12 buah
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Tunjangan pengelola keuangan yang dibayar - Tunjangan pengelola barang milik daerah yang dibayar - Materai yang tersedia - Blanko kwitansi dan blanko SPM yang dicetak - Dokumen keuangan yang digandakan	12 bulan 12 bulan 300 lembar 100 buku 100.000 lembar	12 bulan 12 bulan 300 lembar 100 buku 100.000 lembar

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jasa kebersihan kantor/cleaning service yang tersedia  - peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 orang/ bulan (144 orang/ tahun) 1 Tahun	12 orang/ bulan (144 orang/ tahun) 1 tahun
			Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun	1 tahun
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia : - Cetak dokumen - Cetak Map Bappeda - Foto copy surat dan dokumen dinas - Penjilidan dokumen	780 exemplar 600 buah 50.000 lembar 300 exemplar	780 exemplar 600 buah 50.000 lembar 300 exemplar
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- Belanja alat listrik dan elektronik yang tersedia - Lampu sorot yang tersedia	1 tahun  1 paket	1 tahun  -
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tabung pemadam kebakaran yang diisi - Kursi dan terop yang disewa - Cinderamata - Mesin ketik manual - Mesin penghancur kertas - Mesin absensi - Genset - Mesin pompa air - Meja resepsionist - Kursi kerja pejabat - kursi staf - Kursi hadap - Kursi tunggu - Rak TV	6 buah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket 3 buah 100 buah 2 set 10 set 3 buah	6 buah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket 3 buah 100 buah 2 set 10 set 3 buah
				- Bufet - Rak buku - AC - LCD TV - Tangga aluminium - Laptop - Scanner - Printer - Gorden	2 set 3 set 6 unit 1 unit 1 unit 6 unit 1 unit 10 unit 1 paket	2 set 3 set 6 unit 1 unit 1 unit 6 unit 1 unit 10 unit 1 paket
			Penyediaan makan dan minum	- Makanan dan minuman rapat koordinasi yang tersedia - Makanan dan minuman tamu yang tersedia	1 tahun  1 tahun	1 tahun  1 tahun
			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta/Provinsi lainnya yang dilaksanakan - Perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan	1 tahun  1 kali	1 tahun  1 kali

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
			Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	- Honor perencana yang tersedia - Honor PTT yang tersedia	129 orang 15 orang	122 orang 10 orang
			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	- Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	1 tahun	1 tahun
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran kerja aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Alat - alat angkutan darat bermotor micro bus yang diadakan	3 unit	3 unit
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	1 unit (11 paket)	1 unit (11 paket)
				- Jasa konsultan perencana yang tersedia - Jasa konsultan pengawas yang tersedia	1 paket	1 paket
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	81 unit	79 unit
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	58 unit	52 unit
				AC kursi tamu rak arsip pompa dan instalasi air bersih	52 unit 1 set 3 unit 2 unit	52 unit - - -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Komputer/PC Laptop Mesin ketik Sound system Faximile dan telpon printer LCD Proyektor server internet	62 unit 41 unit 7 unit 5 unit 2 unit 65 unit 5 unit 1 Tahun	62 unit 41 unit 7 unit 3 unit - 50 unit 5 unit 1 Tahun			
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Peserta rapat koordinasi JFP	50 orang	50 orang
				Peserta rapat koordinasi Regional JFP	50 orang	50 orang
				Kajian kedudukan dan mekanisme kerja para pemangku JFP	1 dokumen	1 dokumen
			Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT	1 paket	1 paket	
Sistem kendali honor dan perjalanan dinas	1 paket	1 paket				
Pembinaan mental dan fisik aparatur	Aparatur yang terbina mental dan fisik	112 orang	112 orang			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda Provinsi Tahun 2014 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
5.	Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Data/Informasi	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Peta tematik KSP Pototano	1 kawasan	1 kawasan
				- Peta spasial potensi wilayah NTB yang mutakhir	1 dokumen	1 dokumen
				- Sistem Informasi Geog-rafis (SIG ) Usaha ternak sapi dan kerbau di NTB	1 dokumen	1 dokumen

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
			Penyusunan Profil Daerah	- Buku saku informasi daerah - Buku profil daerah	200 Exemplar 200 exemplar	200 Exemplar 200 exemplar
6.	Kerjasama Pembangunan	Meningkatkan efektivitas Kerjasama pembangunan	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	- Buku Nusa Tenggara Barat Dalam Data Tahun 2015 yang dicetak - Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB Tahun 2014 yang dicetak - Indek Pembangunan Regional Prov. NTB Tahun 2014 yg disusun - Analisis Daya Saing Daerah Provinsi NTB Tahun 2015 yang disusun - Peserta rapat koordinasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah - peserta rapat evaluasi ketersediaan data SIPD - Peserta seminar analisa daya saing daerah provinsi NTB tahun 2015	190 buku  150 buku  1 Dokumen  1 dokumen  38 orang  38 orang  38 orang	190 buku  150 buku  1 Dokumen  1 dokumen  38 orang  38 orang  38 orang
7.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public	- Laporan hasil Rapat Kerja Bappeda Kab/kota se NTB yang dicetak	15 buku	15 buku
				- Laporan hasil Forum SKPD Provinsi NTB yang dicetak	15 buku	15 buku
			- Laporan hasil kegiatan sarasehan pembangunan NTB yang dicetak	15 buku	15 buku	
			- Peserta pelatihan perencanaan pembangunan	25 orang	25 orang	
			Penyusunan rancangan RKP	- Buku RKP Provinsi NTB Tahun 2015 yang dicetak - Buku RKP Provinsi NTB Tahun 2017 yang dicetak	75 buku 75 buku	75 buku 75 buku
			Penyelenggaraan musrenbang RKP	- Rencana Pembangunan Daerah yg disusun - Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKP Provinsi NTB Tahun 2017 yang dicetak - Peserta Pra Musrenbang RKP Provinsi NTB Tahun 2017 - Peserta Musrenbang RKP Provinsi NTB Tahun 2017	1 dokumen  15 Buku  600 orang  650 Orang	1 dokumen  15 Buku  600 orang  650 Orang

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
			Koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 yang dicetak	1 dokumen (20 buku)	1 dokumen (20 buku)
			Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2014 yang dicetak	1 dokumen (200 Buku)	1 dokumen (200 Buku)
			Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	- Dokumen Evaluasi Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB Semester II TA. 2015 dan Semester I TA 2015 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (60 Buku)	1 dokumen (60 Buku)
				- Dokumen Evaluasi Triwulanan APBN Triwulan IV TA. 2014 dan Triwulan I, II dan III TA. 2015 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (30 Buku)	1 dokumen (30 Buku)
				- Dokumen Sinkronisasi Program Kegiatan APBN dengan APBD Tahun Anggaran 2015 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (20 Buku)	1 dokumen (20 Buku)
				- Dokumen Evaluasi UKP-PPP Triwulan IV TA. 2014 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (60 Buku)	1 dokumen (60 Buku)
				- Evaluasi Dokumen RKPD, KUA/PPAS dan DPA SKPD TA. 2015 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (20 Buku)	1 dokumen (20 Buku)
				- Rapergub Program Kegiatan Prioritas dan Pendukung dalam rangka pencapaian indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dan Rapergub Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (20 Buku)	1 dokumen (20 Buku)
			Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	- Dokumen KUA Perubahan TA 2015 yang di cetak (draft dan final ) yang disusun dan dicetak	1 dokumen (75 Buku)	1 dokumen (75 Buku)
				- Dokumen KUA TA 2017 yang dicetak (draft dan final) yang disusun dan dicetak	1 dokumen (75 Buku)	1 dokumen (75 Buku)
				- Dokumen PPAS Perubahan TA 2015	1 dokumen (75 Buku)	1 dokumen (75 Buku)



NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
				yang di cetak (draft dan final) yang dicetak		
				- Dokumen PPAS TA 2017 yang dicetak (draft dan final) yang disusun dan dicetak	1 dokumen (75 Buku)	1 dokumen (75 Buku)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Buku Laporan Tahunan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (15 Buku)	1 dokumen (15 Buku)
				- Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (25 Buku)	1 dokumen (25 Buku)
				- Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Prov. NTB Tahun 2017 yang disusun dan dicetak	1 dokumen (25 Buku)	1 dokumen (25 Buku)
				- DPPA Bappeda Prov. NTB TA 2015 yg disusun dan dicetak	1 dokumen (25 Buku)	1 dokumen (25 Buku)
				- DPA Bappeda Prov. NTB TA 2017 yg disusun dan dicetak	1 dokumen (25 Buku)	1 dokumen (25 Buku)
				- Laporan Capaian Kinerja Bappeda yang disusun	1 dokumen)	1 dokumen
			Sosialisasi / publikasi perencanaan pembangunan daerah	- Sosialisasi/publikasi melalui media cetak (Lombok Post) - Sarana dan prasarana sosialisasi/publikasi yang diadakan : • Spanduk • Baliho • Umbul-umbul • Bendera merah putih uk.200 x 130 cm. • Bendera merah putih uk.100 x 60 cm. • Gapura kegiatan 17 Agustus • Publikasi di media cetak dan elektronik yang dilaksanakan	1 kali  30 buah 15 Buah 25 Buah 2 Buah  10 Buah 1 Kegiatan 1 tahun	1 kali  30 buah 15 Buah 25 Buah 2 Buah  10 Buah 1 Kegiatan 1 tahun
			Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Perda SIPPD-PT yang disusun dan dicetak Laporan kegiatan RKPD Berbasis Online yang dicetak	1 dokumen (100 buku) 20 buku	1 dokumen (100 buku) 20 buku
			Sinkronisasi dokumen RPJMD Provinsi NTB	Review RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 yang disusun Laporan pelaksanaan sinkronisasi RPJMD Provinsi NTB Kab/Kota yang dicetak RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 yang dicetak	1 dokumen  10 buku  500 buku	1 dokumen  10 buku  500 buku

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
8.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	1 dokumen (30 buku)	1 dokumen (30 buku)
				Laporan tahunan DBHCHT Provinsi NTB	1 dokumen (20 buku)	1 dokumen (20 buku)
				Rakor penanggulangan kemiskinan	2 kali (120 orang)	2 kali (120 orang)
				Rakor DBHCHT	2 kali (110 orang)	2 kali (110 orang)
				Rapat subbid Pertanian & Kelautan	6 kali (120 orang)	6 kali (120 orang)
				Bimtek P3BM	1 kali (40 orang)	1 kali (40 orang)
				Rakor P2B	2 kali (110 orang)	2 kali (110 orang)
				Peta jalan pengembangan komoditi unggulan daerah Provinsi NTB	1 dokumen	1 dokumen
				Laporan LP2KD	1 dokumen (30 buku)	1 dokumen (30 buku)
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Database indikator capaian target MDGS di Provinsi NTB	1 dokumen (25 buku)
Laporan tahunan pencapaian MDGs di Provinsi NTB	1 dokumen (25 buku)	25 buku				
Buku (laporan) pelaksanaan KEK Provinsi NTB	1 dokumen (25 buku)	1 Dokumen				
Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri PUD	1 dokumen	30 orang				
	Rapat Forum Bumdes Provinsi NTB	1 kali (50 orang)	50 orang			
	Rakor PNPM PISEW	2 kali (120 orang)	60 orang			
	Rapat evaluasi capaian indikator MDGs	2 kali (80 orang)	30 orang			
	Rapat PEL	2 kali (60 orang)	60 orang			
	Rapat koordinasi KEK	8 kali (240 orang)	40 orang			
	Rakor kegiatan industri dan keuangan	3 kali (90 orang)	60 orang			
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	Rapat evaluasi dan FGD DBHCHT	2 kali (240 orang)	2 kali (240 orang)		
9.	Perencanaan sosial budaya	Meningkatnya Kualitas Rencana sosial dan budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Rapat koordinasi program/kegiatan bidang Pemerintahan	7 kali (140 orang)	7 kali (140 orang)
				Rapat evaluasi capaian kinerja SKPD mitra bidang sosial	1 kali (30 orang)	1 kali (30 orang)
				Rapat penyusunan Pergub Bale Mediasi	2 kali (40 orang)	2 kali (40 orang)
				Rakor penyusunan dokumen penyalarsan perencanaan pembangunan sosial	2 kali (93 orang)	2 kali (93 orang)
				Sosialisasi Pergub Bale Mediasi	1 kali (120 orang)	1 kali (120 orang)

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	Perda tentang Pemerataan Akses Air Bersih Roadmap Generasi Emas NTB 2025 Gugus tugas program PAUDHI Rakor Pemerataan Akses Air Bersih/Air Minum se Provinsi NTB	1 dokumen (200 buku)  1 dokumen  1 dokumen  1 kali (90 orang)	1 dokumen (200 buku)  1 dokumen  1 dokumen  1 kali (90 orang)
10.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah	Rakor perencanaan bidang prasarana wilayah Dokumen Identifikasi pelayanan air bersih Provinsi NTB	6 kali (100 orang)  1 dokumen	6 kali (100 orang)  1 dokumen
			Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (BKPRD) Raperda KSP Agropolitan Alasutan Seminar Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia Seminar Tambora sebagai geopark nasional Sosialisasi Tambora sebagai geopark nasional Konsultasi publik penyusunan Perda KSP Agropolitan Alasutan	9 kali (450 orang)  1 dokumen  1 kali (75 orang) 1 kali (75 orang)  1 kali (75 orang)  1 kali (75 orang)	9 kali (450 orang)  1 dokumen  1 kali (75 orang) 1 kali (75 orang)  1 kali (75 orang)
				Sosialisasi Geopark Rinjani sebagai geopark dunia Workshop Geopark Rinjani Rencana Induk Pengembangan Geopark Rinjani Rakor Program Compact kemakmuran Hijau	1 kali (75 orang)  1 kali (75 orang) 1 Dokumen  3 kali (105 orang)	1 kali (75 orang)  1 kali (75 orang) 1 Dokumen  3 kali (105 orang)
			Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi WISMP II Peserta Rakor PPMU dan PPIU Pelatihan TPM Program WISMP II Pelatihan penguatan Komisi Pengelola Irigasi Program WISMP II Workshop Penyusu-nan Profil KPI dan Success Story Program WISMP II Workshop penyusu-nan program terpadu kelembagaan pengelolaan irigasi program WISMP II	8 kali (320 orang) 13 kali (280 orang) 1 kali (30 orang) 1 kali (46 orang)  1 kali (48 orang)  1 kali (60 orang)	8 kali (320 orang) 13 kali (280 orang) 1 kali (30 orang) 1 kali (46 orang)  1 kali (48 orang)  1 kali (60 orang)

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
II	URUSAN STATISTIK					
11	<b>Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah	Kajian Penelitian Arus Barang dan Jasa di NTB yang disusun dan dicetak Kajian Profil Kemiskinan di Perkotaan yang disusun dan dicetak Kajian Potensi Perikanan dan Kelautan di Prov. NTB yang disusun dan dicetak Kajian Dampak Pariwisata dalam Pembangunan Daerah yang disusun dan dicetak Survey Islamic Center (IC) Mataram dalam cita, citra dan ekspektasi Publik yang disusun dan dicetak Survey respon masyarakat terhadap program unggulan Prov. NTB yang disusun dan dicetak kegiatan FGD Rapat kegiatan penyusunan kajian (4 kajian) Rapat kegiatan penyusunan hasil survey	1 dokumen (20 buku) 1 dokumen (20 buku) 1 dokumen (20 buku) 1 dokumen (20 buku) 1 dokumen (20 buku) 1 dokumen (20 buku) 14 kali (@25 orang) 4 kali (@50 orang) 2 kali (@100 orang)	1 dokumen (20 buku) 1 dokumen (20 buku) 1 dokumen (20 buku) 1 dokumen (20 buku) 14 kali (@25 orang) 4 kali (@50 orang) 2 kali (@100 orang)

### 2.1.3. Akuntabilitas Keuangan/Capaian Serapan Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban dari anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Pada tahun 2015 Bappeda Provinsi NTB memperoleh anggaran dari Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi NTB Tahun 2015, serta Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi NTB Tahun 2015.

Pada tahun anggaran 2015, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat mengelola anggaran sebesar Rp. 25.237.629.400,- dimana realisasi keuangan sampai dengan bulan September telah mencapai 50,76 % atau Rp. 12.811.595.860,- dan realisasi fisik sebesar 52,40 %. Dengan memaksimalkan sumber daya yang telah tersedia, Bappeda berkomitmen untuk mendukung program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan serta meningkatkan posisi IPM NTB. Melalui APBD Tahun Anggaran 2015 Bappeda melaksanakan 2 urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan statistik dengan masing – masing program berjumlah 10 program pada urusan perencanaan pembangunan dan 1 program di urusan statistik.

❖ Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk belanja gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil. Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.035.301.060.-, sampai 31 Desember 2015 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.646.201.650.- (95,16 %), dan realisasi fisik sebesar 100 %. sisa anggaran sebesar Rp. 389.099.410.-.

❖ Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bappeda Provinsi NTB dialokasikan untuk 11 program dan 44 kegiatan. Alokasi anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. **17.202.328.340.** sampai dengan 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 15.260.810.393.- atau 88,71%, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 1.941.517.947, dengan realisasi fisik sebesar 99,73 %. Penjelasan lebih rinci tentang Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3  
Program, Kegiatan, pagu dan Realisasi Belanja Langsung  
Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
		KEUANGAN		Fisik (%)	
		(Rp)	%		
<b>BAPPEDA PROVINSI NTB</b>	<b>25,237,629,400</b>	<b>22,907,012,043</b>	<b>90.77</b>	<b>99.81</b>	<b>2,330,617,35</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8,035,301,060</b>	<b>7,646,201,650</b>	<b>95.16</b>	<b>100.00</b>	<b>389,099,410</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17,202,328,340</b>	<b>15,260,810,393</b>	<b>88.71</b>	<b>99.73</b>	<b>1,941,517,947</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>6,326,530,640</b>	<b>5,836,260,364</b>	<b>92.25</b>	<b>99.95</b>	<b>490,270,276</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	4,950,000	4,950,000	100.00	100.00	-
Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	493,620,000	458,848,001	92.96	100.00	34,771,999
Penyediaan jasa administrasi keuangan	119,194,000	119,144,000	99.96	100.00	50,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	213,052,000	205,304,000	96.36	100.00	7,748,000
Penyediaan alat tulis kantor	235,000,000	235,000,000	100.00	100.00	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57,000,000	42,205,000	74.04	100.00	14,795,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,900	12,343,500	61.71	85.00	7,657,400
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	592,430,000	549,515,400	92.76	100.00	42,914,600
Penyediaan makanan dan minuman	155,000,000	126,954,900	81.91	100.00	28,045,100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,000,825,250	960,759,296	96.00	100.00	40,065,954
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	2,577,500,000	2,263,450,000	87.82	100.00	314,050,000
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	857,958,490	857,786,267	99.98	100.00	172,223
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2,189,734,000</b>	<b>1,957,178,277</b>	<b>89.38</b>	<b>99.73</b>	<b>232,555,723</b>
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	878,300,000	876,753,900	99.82	100.00	1,546,100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	552,500,000	528,400,000	95.64	100.00	24,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	603,934,000	442,701,877	73.30	100.00	161,232,123
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	60,000,000	27,760,000	46.27	90.00	32,240,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	95,000,000	81,562,500	85.86	100.00	13,437,500
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>295,520,000</b>	<b>176,104,000</b>	<b>59.59</b>	<b>100.00</b>	<b>119,416,000</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	187,200,000	90,329,000	48.25	100.00	96,871,000
Pembinaan mental dan fisik aparatur	108,320,000	85,775,000	79.19	100.00	22,545,000

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
		KEUANGAN		Fisik (%)	
		(Rp)	%		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>35,700,000</b>	<b>35,400,000</b>	<b>99.16</b>	<b>100.00</b>	<b>300,000</b>
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	35,700,000	35,400,000	99.16	100.00	300,000
<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>152,620,000</b>	<b>142,269,400</b>	<b>93.22</b>	<b>100.00</b>	<b>10,350,600</b>
Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	117,750,000	110,399,400	93.76	100.00	7,350,600
Penyusunan Profile Daerah	34,870,000	31,870,000	91.40	100.00	3,000,000
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>703,930,000</b>	<b>660,860,000</b>	<b>93.88</b>	<b>100.00</b>	<b>43,070,000</b>
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	703,930,000	660,860,000	93.88	100.00	43,070,000
<b>Program Perencanaan Pembanguna Daerah</b>	<b>2,657,411,000</b>	<b>2,316,668,650</b>	<b>87.18</b>	<b>100.00</b>	<b>340,742,350</b>
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	416,721,000	394,427,650	94.65	100.00	22,293,350
Penyusunan Rancangan RKPD	183,050,000	158,420,000	86.54	100.00	24,630,000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	595,200,000	556,670,000	93.53	100.00	38,530,000
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50,125,000	45,325,000	90.42	100.00	4,800,000
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	138,710,000	137,774,000	99.33	100.00	936,000
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	205,605,000	177,195,000	86.18	100.00	28,410,000
Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	198,000,000	156,998,000	79.29	100.00	41,002,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan	538,450,000	437,700,000	81.29	100.00	100,750,000
Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	103,500,000	54,534,000	52.69	100.00	48,966,000
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	68,250,000	50,450,000	73.92	100.00	17,800,000
Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	159,800,000	147,175,000	92.10	100.00	12,625,000
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>1,269,780,000</b>	<b>1,192,398,830</b>	<b>93.91</b>	<b>100.00</b>	<b>77,381,170</b>
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	241,600,000	219,050,000	90.67	100.00	22,550,000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	265,240,000	247,490,000	93.31	100.00	17,750,000
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	762,940,000	725,858,830	95.14	100.00	37,081,170

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
		KEUANGAN		Fisik (%)	
		(Rp)	%		
<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>469,874,900</b>	<b>435,506,900</b>	<b>92.69</b>	<b>100.00</b>	<b>34,368,000</b>
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	196,560,000	180,570,000	91.87	100.00	15,990,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	273,314,900	254,936,900	93.28	100.00	18,378,000
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA</b>	<b>2,537,437,800</b>	<b>2,024,388,422</b>	<b>79.78</b>	<b>98.50</b>	<b>513,049,378</b>
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	376,580,000	356,258,000	94.60	100.00	20,322,000
Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	930,375,000	780,583,613	83.90	98.80	149,791,387
Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	1,230,482,800	887,546,809	72.13	97.82	342,935,991
<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>563,790,000</b>	<b>483,775,550</b>	<b>85.81</b>	<b>100.00</b>	<b>80,014,450</b>
Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah	563,790,000	483,775,550	85.81	100.00	80,014,450

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat Kabupaten/Kota menjadi mutlak.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :



1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders), pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa/kelurahan/kecamatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah menjadi agenda tetap tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait yang dilaksanakan baik melalui Musrenbang Kabupaten/Kota, Pra Musrenbang Provinsi, maupun Musrenbang Provinsi.
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dengan disosialisasikannya Sistem Informasi Musrenbang baik melalui media cetak maupun elektronik (RKPD online).
6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan antara lain:

1. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan;
2. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab lingkungan dan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

### **2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang implementasinya di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB yang disingkat menjadi Bappeda, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan dengan rincian tugas sebagaimana dijabarkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja badan-badan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

#### **1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB**

Mempunyai tugas pokok Membantu gubernur dalam menyusun rencana pembangunan daerah, merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, administrasi umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah, dengan rincian tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; dan
- e. membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

## 2. **Sekretaris**

Sekretaris memfunyai tugas membantu kepala badan dalam menyusun dan merumuskan bahan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum dan kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan administrasi dan koordinasi internal;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- i. Pengelolaan kearsipan dinas;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- k. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pakar; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

## 3. **Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur**

Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan

pariwisata. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis buidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur, meliputi : urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan perhubungan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan lingkungan hidup, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penghubung Daerah, Sekretariat KPID, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Humas;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur;
- e. Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### **4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang perekonomian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dan Litbang.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian;

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian, meliputi: urusan pangan, urusan pertanian, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan pariwisata, Dinas Peternakan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Perekonomian, dan Biro Umum;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perekonomian;
- d. Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perekonomian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### **5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

Bidang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi evaluasi dan pelaporan perencanaan program pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan, sosial budaya
- b. Penyelenggaraan koordinasi rencana pembangunan di bidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan, sosial budaya yang disusun oleh SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota serta berada dalam wilayah provinsi, meliputi : urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan tenaga kerja, urusan transmigrasi, urusan perpustakaan, urusan kearsipan, urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,

Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan SDM Daerah, Bakesbangpoldagri, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Sat Pol PP, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Organisasi, RSUD Provinsi, RSUD H. L. Manambai Abdul Kadir Sumbawa, dan RSJ Mutiara Sukma;

- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- d. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program bidang sosial budaya;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

## **6. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menentukan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan wilayah, sosial dan budaya, serta informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial;
- b. Penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pemahaman ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek sosial budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek ekonomi dan wilayah, sosial budaya, informasi geospasial dan aspek lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;

- e. Pemberian fasilitas pendukung pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pembentukan forum komunikasi Penelitian dan Pengembang;
- f. Penyusunan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Penyiapan rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Penyusunan rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buku litbang;
- i. Penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan pengembang;
- l. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

#### **7. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan**

Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis rencana program, data dan informasi, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah;

- d. Penyusunan data dan informasi perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah;
- e. Penyusunan laporan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017**

Rancangan RKPD Provinsi NTB tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD. Rancangan RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan. Pada prinsipnya program dan kegiatan dalam Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018.

Secara umum hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 terhadap Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 2.4.



Tabel 2.4

Kode	Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017					Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2017				
	Usuran/ Review Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 Terhadap Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Usuran/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.3	<b>Usuran Penunjang Perencanaan</b>									
01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	- Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik - Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor	<b>Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>5.878.503.252</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>5.878.503.252</b>	
01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang terlayani	500 surat	26.950.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	500 surat	26.950.000	
02	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik		Jasa telepon, air dan listrik	100 %	689.250.000	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air dan listrik	100 %	689.250.000	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Persentase Jasa pengelola administrasi keuangan yang disediakan	100 %	128.860.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Jasa pengelola administrasi keuangan yang disediakan	100 %	128.860.000	
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Persentase Jasa kebersihan kantor yang disediakan	100 %	276.125.440	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase Jasa kebersihan kantor yang disediakan	100 %	276.125.440	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Tahun	15.538.600	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Tahun	15.538.600	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	15.000.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik	1 gedung	20.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik	1 gedung	20.000.000	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 paket (107 unit)	552.893.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 paket (107 unit)	552.893.000	

17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman kantor yang tersedia	12 bulan	195.750.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang tersedia	12 bulan	195.750.000
<b>Kode</b>	<b>Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017</b>					<b>Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2017</b>			
	<b>Urusan/ program/ Kegiatan</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Keluaran</b>		<b>Pagu Anggaran (Rp.)</b>	<b>Urusan/ program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Keluaran</b>		<b>Pagu Anggaran (Rp.)</b>
			<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target Pencapaian</b>			<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target Pencapaian</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah		Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	75 kali	690.375.000	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	75 kali	690.375.000
19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran		Persentase Jasa administrasi dan Teknis perkantoran yang tersdia	100 %	2.988.008.000	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Persentase Jasa administrasi dan Teknis perkantoran yang tersdia	100 %	2.988.008.000
20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri	68 kali	279.753.212	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri	68 kali	279.753.212
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai</b>	<b>Tingkat Kelancaran tugas aparatur</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>1.565.350.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelancaran tugas aparatur</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>1.565.350.000</b>
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Bangunan gedung/kantor yang terpelihara	1 unit	255.600.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bangunan gedung/kantor yang terpelihara	1 unit	255.600.000
24	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	81 unit	606.000.000	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	81 unit	606.000.000
26	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	75 unit	57.400.000	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	75 unit	57.400.000
30	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor		Peralatan kantor yang dipelihara	224 unit	90.000.000	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor	Peralatan kantor yang dipelihara	224 unit	90.000.000
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Gedung kantor yang direhab	1 unit	556.350.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang direhab	1 unit	556.350.000
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>Tingkat Kompetensi Aparatur</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>286.925.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat Kompetensi Aparatur</b>	<b>2 kegiatan</b>
01	Pendidikan dan pelatihan formal		Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	184.625.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	184.625.000

04	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur		Aparatur yang dibina mental dan fisik	115 orang	10.2300.000	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Aparatur yang dibina mental dan fisik	115 orang	10.2300.000
Kode	Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017					Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2017			
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/ program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggung-jawab	Rencana Program	1 kegiatan	51.041.100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Rencana Program	1 kegiatan	51.041.100
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Dokumen keuangan akhir tahun	1 dokumen	51.041.100	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen keuangan akhir tahun	1 dokumen	51.041.100
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Manajemen Aset	1 dokumen	57.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	1 dokumen	57.500.000
01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah		Laporan Manajemen Aset	1 dokumen	57.500.000	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Laporan Manajemen Aset	1 dokumen	57.500.000
15	Program Pengembangan data/Informasi	- Terkelolanya basis data spasial daerah - Tersebarinya data dan informasi pembangunan berbasis web	Rencana Program perencanaan	5 dokumen	665.136.740	Program Pengembangan data/Informasi	Rencana Program perencanaan	5 dokumen	665.136.740
01	Pengumpulan; Updating; dan analisis data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan		Dokumen spasial dan non-spasial	1 dokumen	286.632.340	Pengumpulan; Updating; dan analisis data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Dokumen spasial dan non-spasial	1 dokumen	286.632.340
09	Penyusunan Data Spasial		Dokumen data spasial	4 dokumen	378.504.400	Penyusunan Data Spasial	Dokumen data spasial	4 dokumen	378.504.400
16	Program Kerjasama Pembangunan				295.397.120	Program Kerjasama Pembangunan			295.397.120
06	Pengelolaan Jaringan dan Kerjasama Informasi Geospasial				295.397.120	Pengelolaan Jaringan dan Kerjasama Informasi Geospasial			295.397.120
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat - Tersedianya dokumen renstra, renja	Rencana Pembangunan daerah	12 kegiatan	4.122.737.428	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana Pembangunan daerah	12 kegiatan	4.122.737.428

		SKPD dan LAKIP yang berkualitas							
Kode	Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017					Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2017			
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	- Tersedianya dokumen - perencanaan pembangunan yang berdaya guna, selaras dan antar sektor dan antar wilayah - Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 dokumen	544.185.428	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 dokumen	544.185.428
08	Penyusunan Rancangan RKPD		Dokumen RKPD	2 dokumen	271.160.000	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen RKPD	2 dokumen	271.160.000
09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan KDH	1 Dokumen	1.029.817.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan KDH	1 Dokumen	1.029.817.000
11	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah SKPD	1 dokumen	180.450.000	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah SKPD	1 dokumen	180.450.000
12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		Dokumen LKPJ	1 dokumen	178.681.000	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ	1 dokumen	178.681.000
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1 dokumen	385.170.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1 dokumen	385.170.000
14	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS		Dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	184.000.000	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	184.000.000
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Dokumen Perencanaan	6 dokumen	363.090.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	6 dokumen	363.090.000
16	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	23 kali	88.000.000	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	23 kali	88.000.000
18	Evaluasi Dokumen Perencanaan		Dokumen Hasil Evaluasi	5 dokumen	264.520.000	Evaluasi Dokumen Perencanaan	Dokumen Hasil Evaluasi	5 dokumen	264.520.000
21	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Aplikasi yang dikembangkan	8 aplikasi	525.836.000	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi yang dikembangkan	8 aplikasi	525.836.000
22	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB		Jumlah Dokumen Penyelarasan RPJMD	3 dokumen	107.828.000	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Penyelarasan RPJMD	3 dokumen	107.828.000

			Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun				Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun		
Kode	Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017					Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2017			
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	- Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	<b>Rencana Pembangunan ekonomi</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>2.083.341.700</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Rencana Pembangunan ekonomi</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>2.083.341.700</b>
10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT		Dokumen perencanaan kegiatan DBH CHT Provinsi NTB yang disusun	1 Dokumen	750.000.000	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	Dokumen perencanaan kegiatan DBH CHT Provinsi NTB yang disusun	1 Dokumen	750.000.000
11	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan		Dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan yang disusun	3 Dokumen	439.285.000	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan	Dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan yang disusun	3 Dokumen	439.285.000
12	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dan pariwisata		Dokumen perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dan pariwisata yang disusun	1 Dokumen	296.735.000	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dan pariwisata	Dokumen perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dan pariwisata yang disusun	1 Dokumen	296.735.000
13	Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian		Dokumen perencanaan bidang pangan dan pertanian yang disusun	1 Dokumen	597.321.700	Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian	Dokumen perencanaan bidang pangan dan pertanian yang disusun	1 Dokumen	597.321.700
23	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	- Terwujudnya rencana pemerintah yang bersih dan melayani Tersedianya sarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan PMKS yang baik	<b>Rencana Pembangunan sosial dan budaya</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>1.334.584.000</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Rencana Pembangunan sosial dan budaya</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>1.334.584.000</b>
05	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan		Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan yang disusun	1 dokumen	179.510.000	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan yang disusun	1 dokumen	179.510.000
08	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra		Dokumen perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra yang disusun	1 dokumen	544.640.000	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	Dokumen perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra yang disusun	1 dokumen	544.640.000
09	Penguatan Lembaga Mediasi		Laporan kegiatan penguatan lembaga mediaasi	1 dokumen	146.414.000	Penguatan Lembaga Mediasi	Laporan kegiatan penguatan lembaga mediaasi	1 dokumen	146.414.000

10	Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi		Dokumen evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang tersedia	1 dokumen	106.300.000	Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	Dokumen evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang tersedia	1 dokumen	106.300.000
Kode	Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017					Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2017			
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang disusun	1 dokumen	357.720.000	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang disusun	1 dokumen	357.720.000
<b>24</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam</b>	<b>Terwujudnya konektivitas antar wilayah, layanan listrik memadai, air lestari dan akses telekomunikasi untuk semua</b>	<b>Dokumen perencana Rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam an</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>2.227.467.560</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam</b>	<b>Dokumen perencana Rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam an</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>2.227.467.560</b>
02	Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup		Dokumen Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun	1 dokumen	349.561.000	Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun	1 dokumen	349.561.000
07	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah		Dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun	2 Dokumen	543.098.500	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun	2 Dokumen	543.098.500
10	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif		Dokumen Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang disusun	... dokumen	561.859.500	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Dokumen Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang disusun	... dokumen	561.859.500
11	Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB		Dokumen Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB yang disusun	1 dokumen	772.948.560	Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB	Dokumen Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB yang disusun	1 dokumen	772.948.560
<b>15</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>			<b>Rencana penataan ruang</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>1.718.092.000</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Rencana penataan ruang</b>	<b>3 dokumen</b>
04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	2 dokumen	1.143.372.000	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	2 dokumen	1.143.372.000	
05	Peningkatan peran serta BKPRD dalam perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan	1 dokumen	574.720.000	Peningkatan peran serta BKPRD dalam perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan	1 dokumen	574.720.000	

	pembangunan		Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah			pembangunan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah			
Kode	Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2017					Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2017				
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan				1.682.500.270	Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan				1.682.500.270
15	Program Penelitian dan Pengembangan			.. dokumen	1.682.500.270	Program Penelitian dan Pengembangan		.. dokumen	1.682.500.270	
04	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan ekonomi			... Dokumen	449.748.090	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan ekonomi		... Dokumen	449.748.090	
06	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan sosial budaya			... Dokumen	592.748.090	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan sosial budaya		... Dokumen	592.748.090	
07	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah			... Dokumen	504.748.090	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah		... Dokumen	504.748.090	
08	Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan				122.960.000	Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan			122.960.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>21.815.621.600</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>21.815.621.600</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

##### **3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah "**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**"

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui tujuh misi Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkembang dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.



3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia pintar, Indonesia sehat, Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memerteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama. yaitu:

1. **Dimensi Pembangunan Manusia** dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memerteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
2. **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. **Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan** dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.

4. **Kondisi Perlu** yang memuat program untuk peningkatan kepastian penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

### **3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, visi pembangunan Provinsi NTB adalah **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"**. Visi tersebut diimplementasikan melalui 7 (tujuh) misi. yaitu:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. penegakan hukum yang berkeadilan. dan memantapkan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. mempercepat penurunan kemiskinan. dan mengembangkan keunggulan daerah.
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tema RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah "Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Lingkungan untuk mengurangi kemiskinan" dengan prioritas pembangunan adalah:

1. Budipekerti Luhur
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Kesejahteraan Sosial
6. Agro Industri dan Ketahanan Pangan
7. Wirausaha dan iklim investasi
8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
10. Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Gubernur NTB dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk untuk rencana pembangunan daerah. Untuk itu telah disusun visi dan misi Bappeda Provinsi NTB yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam Renstra Bappeda 2013 – 2018 telah dirumuskan visi Bappeda Provinsi NTB 2013 – 2018 yaitu **“MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda. Misi Bappeda Provinsi NTB tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur.
2. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel untuk perencanaan pembangunan.
3. Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
5. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.
6. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut, Bappeda Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan derivasi dari masing – masing tujuan. Sebagai pernyataan dari misi dan tujuan menjadi hasil akhir yang dicapai

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan dari misi Bappeda Provinsi NTB antara lain:

- Misi 1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur. dengan tujuan:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kantor
  2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan
  3. Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan.
- Misi 2 Menyediakan data dan informasi yang akurat. mutakhir dan akuntabel
1. Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.
  2. Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah.
- Misi 3 Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dalam perencanaan pembangunan
1. Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ.
  2. Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan.
- Misi 4 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
1. Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.
- Misi 5 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.
1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.
  2. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan sosial dasar.
- Misi 6 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang
1. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah.
  2. Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam.

Tujuan dan Sasaran Jagka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jagka Menengah  
Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>Misi 1 Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur</b>		
Meningkatkan kualitas pelayanan kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik</li> <li>- Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor</li> <li>- Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai</li> <li>- Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu tindak lanjut</li> <li>- Pertumbuhan layanan sarana prasarana kantor</li> <li>- Peralatan kantor yang terpelihara</li> <li>- Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan</li> </ul>
Meningkatkan akuntabilitas keuangan	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggungjawab	Penyerapan anggaran
Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat</li> <li>- Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase usulan masyarakat dan Kab/Kota yang diakomodir dalam rencana pembangunan</li> <li>- Penyelesaian dokumen/laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPA SKPD</li> <li>• LAKIP</li> </ul> </li> </ul>
<b>Misi 2 Menyediakan Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir dan Akuntabel</b>		
Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkelolanya basis data spasial daerah</li> <li>- Tersebaranya data dan informasi pembangunan berbasis web</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan data spasial daerah</li> <li>- Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)</li> </ul>
Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah	Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel	Data pembangunan daerah yang diselaraskan
<b>Misi 3 Mendayagunakan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dalam Perencanaan Pembangunan</b>		
Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		- Ketepatan penyelesaian dokumen/laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• KUA/PPAS</li> <li>• LKPJ</li> </ul>
Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan
<b>Misi 4 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah</b>		
Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.	- Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan - Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	- Persentase pemanfaatan SDA potensial daerah - Persentase pengembangan industri daerah
<b>Misi 5 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Sosial Dasar Daerah</b>		
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya rencana pemerintah yang bersih dan melayani	Persentase peningkatan layanan pemerintah yang bersih
Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan sosial dasar	Tersedianya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan pendidikan, kesehatan serta PMKS yang baik	Persentase penyediaan kebutuhan sosial dasar
<b>Misi 6 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah yang Sinergis Berbasis Tata Ruang</b>		
Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah berbasis tata ruang	Terwujudnya konektivitas antar wilayah, layanan listrik memadai, air lestari dan akses telekomunikasi untuk semua	Persentase kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam	- Tersedianya rencana pengelolaan hutan dan lahan - Tersedianya rencana mitigasi dan adaptasi bencana	- Persentase sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah - Persentase penanggulangan korban bencana

### 3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan visi dan misi Provinsi NTB. pada dasarnya kegiatan Bappeda Provinsi NTB adalah sebagai "pengarah" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Rancangan Perda Provinsi NTB Tahun 2016, Bappeda Provinsi Tahun 2017 akan melaksanakan dua urusan penunjang yaitu: 1) urusan penunjang perencanaan; dan 2) urusan penunjang penelitian dan pengembangan yang dibreakdown ke dalam 12 program dan 54 kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi NTB Tahun 2017. Gambaran umum program dan kegiatan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.2, dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 dalam Table 3.3.

Tabel 3.2  
Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017

NO	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN
<b>I</b>	<b>Urusan Penunjang Perencanaan</b>	
1	Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>5. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>9. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>10. Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah</li> <li>11. Penyediaan jasa administrasi dan teknis</li> </ol>

NO	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN
		<p>perkantoran</p> <p>12. Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota</p>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p>1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>3. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor</p> <p>4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</p> <p>5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</p>
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<p>1. Pendidikan dan pelatihan formal</p> <p>2. Pembinaan mental dan fisik aparatur</p>
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<p>1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p>
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>1. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah</p>
6	Program Pengembangan Data/Informasi	<p>1. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program</p> <p>2. Penyusunan Data Spasial</p>
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik</p> <p>2. Penyusunan rancangan RKPD</p> <p>3. Penyelenggaraan musrenbang RKPD</p> <p>4. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah</p> <p>5. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)</p> <p>6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>7. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS</p> <p>8. Penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>9. Publikasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p>10. Evaluasi dokumen perencanaan</p> <p>11. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>12. Penyelarasan dokumen RPJMD Provinsi NTB</p>
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<p>1. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan DBHCHT</p> <p>2. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Investasi dan Keuangan</p> <p>3. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan</p>



NO	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN
		Pariwisata 4. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian
9	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1. Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan 2. Perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesra 3. Penguatan lembaga mediasi 4. Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 5. Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	1. Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah 3. Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif mbinan dan pengendalian pengelolaan irigasi partisipatif 4. Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB
11	Program Perencanaan Tata Ruang	5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 6. Peningkatan Peran Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
<b>II</b>	<b>Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>	
12	Program Penelitian dan Pengembangan	1. Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan ekonomi 2. Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan sosial budaya 3. Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah 4. Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan

Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017  
dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.3</b>	<b>UrusanPenunjang Perencanaan</b>			<b>20.286.075.900</b>		<b>20.890.710.872</b>
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>5.588.477.000</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>6.200.073.064</b>
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	125 surat	26.950.000	125 surat	28.297.500
02	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air dan listrik	100 %	532.750.000	100 %	723.712.500
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Jasa pengelola administrasi keuangan yang disediakan	100 %	128.860.000	100 %	135.303.000
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase Jasa kebersihan kantor yang disediakan	100 %	275.283.840	100 %	289.931.712
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Tahun	15.538.600	1 Tahun	16.315.530

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	7 paket	15.000.000	7 paket	15.750.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik	1 gedung	17.517.700	1 gedung	21.000.000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	246 unit/paket	596.043.000	246 unit/paket	608.182.300
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang tersedia	12 bulan	170.000.000	12 bulan	205.537.500
18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	75 kali	654.375.000	75 kali	724.893.750
19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Persentase Jasa administrasi dan Teknis perkantoran yang tersedia	126 orang	2.884.048.000	126 orang	3.137.408.400
20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri	68 kali	272.110.860	68 kali	293.740.872
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelancaran tugas aparatur</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>1.513.950.000</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>1.072.230.000</b>
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bangunan gedung/kantor yang terpelihara	1 unit	275.600.000	1 unit	281.160.000

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
24	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	81 unit	570.000.000	81 unit	636.300.000
26	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	75 unit	44.500.000	75 unit	60.270.000
30	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor	Peralatan kantor yang dipelihara	184 unit	67.500.000	184 unit	94.500.000
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang direhab	1 unit	556.350.000	1 unit	0
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat Kompetensi Aparatur</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>261.925.000</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>301.271.250</b>
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	184.625.000	10 orang	193.856.250
04	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Aparatur yang dibina mental dan fisik	126 orang	77.300.000	126 orang	107.415.000
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rencana Program</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>51.041.100</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>53.593.155</b>
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen keuangan akhir tahun	1 dokumen	51.041.100	1 dokumen	53.593.155

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>07</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Manajemen Aset</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>57.500.000</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>60.375.000</b>
01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Laporan Manajemen Aset	1 dokumen	57.500.000	1 dokumen	60.375.000
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan data/Informasi</b>	<b>Rencana Program perencanaan</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>433.042.500</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>731.650.414</b>
01	Pengumpulan; Updating; dan analisis data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Dokumen spasial dan non-spasial	1 dokumen	258.159.500	1 dokumen	315.295.574
09	Penyusunan Data Spasial	Dokumen data spasial	4 dokumen	174.883.000	4 dokumen	416.354.840
<b>21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rencana Pembangunan daerah</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>3.833.649.000</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>4.425.728.920</b>
01	Pengembangan partisipasi masya- rakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 dokumen	449.627.000	1 dokumen	598.603.970
08	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen RKPD	2 dokumen	267.720.000	2 dokumen	284.718.000
09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan KDH	1 Dokumen	1.017.550.000	1 Dokumen	1.132.798.700
11	Penyusunan Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah	1 dokumen	167.467.000	1 dokumen	189.472.500

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah Daerah	Daerah SKPD				
12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ	1 dokumen	174.721.000	1 dokumen	187.615.050
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	4 dokumen	374.170.000	4 dokumen	404.428.500
14	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	184.000.000	2 dokumen	193.200.000
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	6 dokumen	357.090.000	6 dokumen	399.399.000
16	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	23 kali	78.000.000	23 kali	92.400.000
18	Evaluasi Dokumen Perencanaan	Dokumen Hasil Evaluasi	1 dokumen	251.870.000	1 dokumen	277.746.000
21	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi yang dikembangkan	8 aplikasi	424.606.000	8 aplikasi	552.127.800
22	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Penyelarasan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	3 dokumen	86.828.000	3 dokumen	113.219.400

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Rencana Pembangunan ekonomi</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>1.683.906.000</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>2.216.675.870</b>
10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	Dokumen perencanaan kegiatan DBH CHT Provinsi NTB yang disusun	1 Dokumen	590.000.000	1 Dokumen	750.000.000
11	Penyusunan perencanaan pem- bangunan bidang investasi dan keuangan	Dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan yang disusun	4 Dokumen	349.785.000	3 Dokumen	483.213.500
12	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dan pariwisata	Dokumen perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagaa- ngan dan pariwisata yang disusun	2 Dokumen	225.735.000	1 Dokumen	326.408.500
13	Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian	Dokumen perencanaan bidang pangan dan pertanian yang disusun	2 Dokumen	518.386.000	1 Dokumen	657.053.870
<b>23</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Rencana Pembangunan sosial dan budaya</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>1.147.843.000</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>1.334.584.000</b>
05	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan yang disusun	2 dokumen	150160.000	1 dokumen	188.485.500
08	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	Dokumen perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra yang disusun	1 dokumen	49.3640.000	1 dokumen	599.104.000
09	Penguatan Lembaga Mediasi	Laporan kegiatan penguatan lembaga mediaasi	1 dokumen	127.414.000	1 dokumen	15.3734.700

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
10	Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	Dokumen evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang tersedia	1 dokumen	104.391.000	1 dokumen	111.615.000
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang disusun	1 dokumen	272.238.000	1 dokumen	393.492.000
<b>24</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam</b>	<b>Dokumen perencana Rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam an</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>2.201.015.000</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>2.394.028.366</b>
02	Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun	3 dokumen	326.061.000	3 dokumen	384.517.100
07	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun	2 Dokumen	522.098.500	2 Dokumen	597.408.350
10	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Dokumen Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang disusun	2 dokumen	561.859.500	2 dokumen	561.859.500
11	Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB	Dokumen Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB yang disusun	1 dokumen	790.996.000	1 dokumen	850.243.416



No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>26</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Rencana penataan ruang</b>	<b>2 kegiatan</b>	1.673.911.000	<b>2 kegiatan</b>	<b>1.775.564.000</b>
01	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	2 dokumen	1.119.154.000	2 dokumen	1.143.372.000
02	Peningkatan peran serta BKPRD dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	1 dokumen	554.757.000	1 dokumen	632.192.000
<b>4.7</b>	<b>Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>					
<b>27</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Data informasi yang disusun</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>1.365.362.000</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>1.682.500.270</b>
01	Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	Dokumen penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun	4 Dokumen	654.552.000	4 Dokumen	449.748.090
02	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan sosial budaya	Dokumen penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan sosial budaya yang disusun	4 Dokumen	454.550.000	4 Dokumen	592.748.090
03	Penelitian dan pengembangan informasi geospasial	Dokumen Penelitian dan pengembangan informasi geospasial yang disusun	1 Dokumen	133.300.000	1 Dokumen	504.748.090

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
04	Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan			122.960.000		135.256.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>19.811.621.600</b>		<b>22.573.211.142</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja**

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2017. Selain itu Rencana Kerja ini juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan tahunan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Provinsi NTB. Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Provinsi NTB sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang

#### **4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2013-2018 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunanyang telah dilaksanakan.
3. Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2017 disusun sesuai RKPD Provinsi NTB Tahun 2017.

### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan untuk menyusun perencanaan dengan target kinerja hasil/keluaran yang lebih terukur

2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
3. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.